**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA
DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI**

Oleh

Teguh Widodo¹, S. Andi Sutrasno², Heru Dradjat Sulisty³

^{1,2,3}Universitas Soerjo, Ngawi

Email: ¹teguhwidodowastuyasa@gmail.com, ²andi.sutrasno@gmail.com

Article History:

Received: 01-05-2025

Revised: 26-05-2025

Accepted: 04-06-2025

Keywords:

Deradicalization, Parole,
Convict, Terrorism

Abstract: *Terrorism action exerts adverse impact on a state, in either defense or economic sector; therefore, it is always threatened with severe punishment by the criminal law in the state jurisdiction. The release of Law Number 5 of 2018 gives new color to the management of terrorism crime, in which the government holds deradicalization program for terrorism convict. This research aims to study the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights' Decree Number PAS-1931.PK.05.09 of 2023 about Parole for Terrorism Convict in realizing the deradicalization attempt. The existence of deradicalization in the attempt of reducing radical activity and neutralizing radicalism for those involved in terrorism crime. This program is held as an attempt of paroling the terrorism crime. The weakness found in the implementation of deradicalization program is that there is no parameter concerning the successfulness level so that there is no parameter of achievement and the subject or the target of deradicalization is not obvious. Some constraints are found in the implementation of deradicalization: the convicts still hold on their ideology tightly, do not have fund, and their life is endangered by their group when they are free later. This research recommends the improvement of coordination between National Counter-Terrorism Agency (BNPT), Resort Police, Military District Command (Kodim), District Court, Religion Court, and Penitentiary to smooth the parole process and the increase in the number of Officers dealing with Terrorism Convicts*

PENDAHULUAN

Aksi teroris membawa dampak buruk bagi suatu negara, baik pada sektor pertahanan maupun sektor perekonomian. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.¹ Terorisme merupakan

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-

ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Jumlah kejahatan terorisme yang signifikan yang berdampak negatif besar terhadap kehidupan sosial bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya angka kejadian teroris dapat berdampak pada disintegrasi sosial, menimbulkan kepanikan dan kecemasan, melemahkan ketahanan sosial masyarakat, dan rentan terhadap kekuatan destruktif yang berujung pada hancurnya persatuan bangsa dan negara.

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme yakni melalui penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan sanksi kepada pelaku terorisme. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat penting untuk berperan dalam pembinaan narapidana teroris agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kebijakan hukum pidana lainnya terkait tindak pidana terorisme.² Program Deradikalisasi adalah program pembinaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Program deradikalisasi di Indonesia dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan berbagai instansi seperti kepolisian, lembaga pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Perlindungan Sosial, ormas, dll, seperti perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Irfan Idris, selaku Direktur Deradikalisasi mengatakan desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu: Reeducasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi.⁴

Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa narapidana yang memenuhi syarat tertentu tanpa kecuali berhak mendapatkan program integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan program pengembangan yang bertujuan membantu narapidana dan anak berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi kondisi yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi?

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

² Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), h. 73.

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat 17.

⁴ Mochamad Nurhuda Febriyansah, et.al, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, h. 91-108.

2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana terorisme di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto dapat dibagi konsep dan tipe kajiannya, yaitu:⁵

1. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan universal, termasuk dalam kajian filsafat hukum;
2. Hukum adalah norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, termasuk dalam kajian ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai *juges through, judicial processes*, termasuk dalam kajian *American Sociological Jurisprudence*, yang mengkaji *law as it is decided by judge*, dengan mengkaji *court behavior*;
4. Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik, termasuk dalam kajian sosiologi hukum, mengkaji *law as it is in society*;
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka, termasuk dalam kajian sosiologi atau antropologi hukum, mengkaji *law as it is in (human) actions*.

Penelitian ini menggunakan konsep kedua, yang memandang hukum telah dibentuk secara nyata (*ius constitutum*) dan telah tampak dalam alam inderawi.⁶ Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai *law as it is written in the books*, secara positivis sebagai norma *ius constitutum*. Hukum dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya kini hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan beberapa program, salah satunya yaitu deradikalisasi. Deradikalisasi adalah sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan radikalisme. Yang menjadi sarannya yaitu para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Deradikalisasi memiliki tujuan untuk menetralsir pemikiran radikalisme. Maksudnya, untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lain.⁷

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah* (Elsam dan Huma 2002) 63 – 77.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara, 2013) 26.

⁷ Andrian W Finaka, Arlyta Dwi Anggraini, *Cegah Radikalisme dengan Deradikalisasi* (On-Line), tersedia di link <https://indonesiabaik.id/infografis/cegah-radikalisme-dengan-deradikalisasi>, (diakses 20 Februari 2024 pukul 20.40)

Pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan radikalisme dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Kesiapsiagaan nasional
- b) Kontra Radikalisasi
- c) Deradikalisasi.

Tentang kesiapsiagaan sudah diatur dalam Pasal 43B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Ayat (1) menyatakan kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana teroris melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, ayat (4) mengatakan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Tentang kontra radikalisasi telah diatur dalam Pasal 43 C, yaitu ayat (1) menyatakan kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme; ayat (3) mengatakan kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Program deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Program deradikalisasi di Indonesia terdiri atas berbagai pendekatan yang ditujukan untuk para narapidana terorisme. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfir. Pendekatan lain yang dilakukan adalah menjauhkan individu dari kelompok narapidana terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam masyarakat normal.⁸

Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara tersebut. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) berjumlah sebelas jenis, yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum;
- 2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- 3) Program pendidikan;
- 4) Pengembangan dialog lintas budaya;
- 5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
- 6) Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme;
- 7) Pengawasan terhadap *cyber terrorism*;
- 8) Perbaikan perangkat perundang-undangan;

⁸ Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, *Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum : Legalitas, Vol. 15 No. 2. 2021., h.3

⁹ MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, (Jagakarsa Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna,), h.47-48

- 9) Program rehabilitasi;
- 10) Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan
- 11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisasi

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan dari penjara sebelum menjalani seluruh masa hukuman. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah menjalani dua pertiga masa pidana, berkelakuan baik, dan telah mengikuti program pembinaan. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh narapidana sebagai hak asasi manusia. Syarat-syarat pembebasan bersyarat secara umum adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
4. Menunjukkan rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Memiliki jaminan dari keluarga atau orang lain yang bertanggung jawab.

Narapidana terorisme tergolong narapidana khusus yang mana dalam proses pembebasan bersyaratnya terdapat tahapan-tahapan khusus yang harus dilalui sebelum pelaksanaan proses pembebasan bersyarat seperti narapidana umum lainnya. Adapun proses pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana terorisme atas nama AM dengan syarat khusus dan umum sebagai berikut:

- 1) Syarat Khusus Dalam Proses Pembebasan Bersyarat Narapidana Terorisme.
 - a) Mengikuti Program Deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Pada Tanggal 14 maret 2023 Narapidana Terorisme atas nama AM diterima di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi dari Rutan Depok. Selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi, AM sudah menunjukkan perilaku yang baik dan kooperatif dalam melaksanakan pembinaan-pembinaan baik pembinaan kerohanian maupun pembinaan kemandirian. Dalam masa pembinaan narapidana AM berkelakuan baik dan selalu menjalankan arahan dari Pamong / Wali napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi. Tanggal 4 April 2023 Kalapas Ngawi kemudian mengirimkan surat permohonan Program deradikalisasi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta guna melengkapi salah satu persyaratan pemberian hak integrasi warga binaan pemasyarakatan (remisi dan pembebasan bersyarat. Tanggal 16 April 2023 program deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berjalan tertutup di Aula Lapas Ngawi

- b) Ikrar Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah melalui tahapan-tahapan pembinaan baik dari intern Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) AM sepenuhnya menyesali dan mengakui bahwa apa yang pernah dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum. AM bersedia dengan ikhlas melepas baiat dari amir atau

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, *Op. Cit.*

pemimpin kelompok/jaringan/organisasi Radikalisme dan Terorisme yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. AM mengakui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sah dalam pandangan Islam dan mengakui bahwa Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tanggal 5 Juni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi, mengirim undangan untuk pelaksanaan kegiatan Pengambilan Sumpah dan Ikrar Kesetiaan NKRI kepada pihak-pihak terkait yang akan dilaksanakan pada Selasa, 13 Juni 2023 Aula Lapas Ngawi. Selasa, 13 Juni 2023 dilaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah dan Ikrar Setia NKRI berjalan dengan tertib dan hikmat. Setelah dilaksanakannya Program Deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengambilan Sumpah dan Ikrar Setia NKRI Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi kemudian mengirim Permohonan Surat Keterangan Program Deradikalisasi sebagai melengkapi berkas untuk usulan remisi dan program integrasi yang selanjutnya dijadikan sebagai syarat umum untuk proses Pembebasan Bersyarat.

2) Syarat Umum Dalam Proses Pembebasan Bersyarat Narapidana Terorisme.

a) Melakukan Pendaftaran Pembebasan Bersyarat

Pihak keluarga atau penjamin melampirkan KTP dan KK ke bagian Registrasi. Kemudian dibuatkan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga dan Surat Pernyataan Narapidana untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa tempat tinggal narapidana yang berisikan bawasannya penjamin bekerjasama dengan Kepala Desa setempat sanggup menjamin sepenuhnya bahwa apabila narapidana tersebut diberikan izin Pembebasan Bersyarat, narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi. Serta sanggup membantu dalam membimbing dan turut mengawasi narapidana yang bersangkutan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Setelah dua surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa, pihak registrasi Lapas membuatkan Laporan Perkembangan Pembinaan dan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) yang dikirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dimana AM pertama kali di proses.

b) Mengusulkan Pralitmas atau Penelitian Kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan Madiun.

Pihak Lapas Ngawi yaitu bagian Registrasi mengusulkan pralitmas ke Balai Pemasyarakatan Madiun yang kemudian diteruskan ke Balai Pemasyarakatan Merauke tempat tinggal AM berdasarkan data dan berkas yang sudah terkumpul.

c) Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke mengirimkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembebasan Bersyarat.

Laporan tersebut berisi bahwa narapidana tersebut telah memenuhi syarat dalam program pembebasan bersyarat setelah dilakukan evaluasi, pengamatan dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

d) Mengusulkan Pembebasan Bersyarat ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

Berdasarkan semua data dan berkas yang sudah terkumpul dan dilengkapi baik dari pihak penjamin maupun pihak Lapas termasuk syarat khusus yaitu Deradikalisasi dan Ikrar Setia NKRI, kemudian dikirimkan ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan sebagai syarat pengusulan pembebasan bersyarat.

- e) Diterbitkan Keputusan MENKUMHAM RI NOMOR: PAS-1931.PK.05.09 TAHUN 2023.
- f) Lapas Ngawi menerbitkan Surat Lepas.

Berdasarkan Keputusan MENKUMHAM RI NOMOR: PAS-1931.PK.05.09 TAHUN 2023, diterbitkan Surat Lepas atas nama AM pada 17 November 2023 ditandatangani Plh. Kalapas Gathot, S.ST.

Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi

Penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Ngawi. Terdapat faktor internal dan eksternal yang menghambat dalam melaksanakan pembebasan bersyarat terhadap terpidana terorisme. Faktor-faktor tersebut meliputi, sebagai berikut:

1) Faktor Internal

- a) Para terpidana teroris sendiri tidak mau mengajukan amnesti dikarenakan masih memegang teguh ideologinya. Beberapa di antara mereka yang tidak mau mengajukan amnesti adalah teroris dan anggota ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Salah satu syarat pembebasan bersyarat adalah selesainya kegiatan deradikalisasi, termasuk upacara pengibaran bendera. Pasal inilah yang menghalangi terpidana terorisme untuk mengajukan amnesti berdasarkan pasal .Narapidana teroris sadar akan kesalahannya dan siap menjalankan program deradikalisasi narapidana teroris telah setuju untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat yang berarti dapat mengatakan bahwa pengarahan mereka di lembaga pemasyarakatan telah berhasil, namun masih ada narapidana yang tidak bersedia mengajukan permohonan pembebasan bersyarat padahal sudah melakukannya menjalani 2/3 hukumannya.
- b) Narapidana AM pada awalnya masih ragu-ragu untuk mengajukan program deradikalisasi yang ditawarkan oleh pemerintah, ia mengira program tersebut memiliki biaya yang sangat mahal sehingga takut mengganggu perekonomian keluarganya, akan tetapi pihak LAPAS Kelas IIB Ngawi telah memberikan pemahaman yang rinci terkait program tersebut yang bebas biaya atau gratis sehingga AM kemudian memantapkan niatnya untuk mengikuti program tersebut setelah berdiskusi kembali dengan keluarganya.
- c) Narapidana AM pada awalnya tidak mau mengajukan Asimilasi dikarenakan takut ketika nanti bebas, ada yang menyerangnya dari kubu organisasinya.

2) Faktor Eksternal

- a) Masih banyaknya Penjamin narapidana terorisme yang mengalami kendala ketika mencari persyaratan administratif disebabkan karena adanya penolakan dari masyarakat sehingga kepala desa setempat tidak dapat mengeluarkan surat persetujuan di domisili narapidana. Kejadian tersebut sebenarnya bukan menjadi kendala yang berarti, karena dapat dilakukan upaya lain. Kepala Desa atau Lurah dari tempat tinggal penjamin (orang tua) menolak maka narapidana terorisme harus mencari penjamin pengganti yang Kepala Desa atau Lurah tempat tinggal penjamin menyetujui.

- b) Proses permohonan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keputusan permohonan pembebasan bersyarat tersebut diterima atau tidak.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana terorisme harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum diawali dengan permohonan dari narapidana ke lapas, dilanjutkan dengan memenuhi syarat-syarat administratif lainnya, kemudian diproses secara berjenjang sampai dengan terbit SK Menkumham. Sedangkan syarat khusus, diawali dengan mengikuti program deradikalisasi dari BNPT, kemudian melakukan ikrar setia kepada NKRI.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu, kuatnya pemahaman (ideologi) dari narapidana, adanya ketkutan atas keamanan dirinya setelah bebas, proses permohonan yang memakan waktu sangat lama. Rekomendasi dalam penelitian ini supaya dilakukan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pembinaan napi terorisme antara lain BNPT, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Kemenag dan Balai Pemasarakatan agar mempermudah dalam proses ikrar setia NKRI hingga pembebasan bersyarat di Lembaga pemsarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] MD. Shodiq, S.H, M.H., *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta : Pustaka Harkatuna, 2018).
- [2] Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012).
- [3] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: Elsam dan Huma 2002).
- [4] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara, 2013)
- [5] Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, *Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum : Legalitas, Vol. 15 No. 2. 2021.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- [7] Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI No. PAS-1931.PK.05.09 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.
- [8] Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- [9] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat.

- [10] Mochamad Nurhuda Febriyansah, et.al, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017
- [11] Andrean W Finaka, Arlyta Dwi Anggraini, *Cegah Radikalisme dengan Deradikalisasi* (On-Line), tersedia di link <https://indonesiabaik.id/infografis/cegah-radikalisme-dengan-deradikalisasi>, (diakses 20 Februari 2024 pukul 20.40)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN